

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum

#### 4.1.1 Kondisi Geografis Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara terletak di bagian barat Indonesia, tepatnya di bagian utara Pulau Sumatera, pada posisi 2°LU–4°LU dan 98°BT–100°BT. Provinsi ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh di utara, Provinsi Riau dan Sumatera Barat di selatan, Samudra Hindia di barat, serta Selat Malaka di timur yang memisahkannya dengan Negara Malaysia. Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara sekitar 72.981,23 km<sup>2</sup>, menjadikannya salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Topografi Sumatera Utara sangat bervariasi, mulai dari pesisir pantai, dataran rendah, hingga pegunungan yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan.

**Tabel 4.1 Topografi Wilayah Menurut Kab/Kota di Sumatera Utara**

No	Kabupaten/Kota	Zona Topografi	Ketinggian (mdpl)
1	Medan	Pesisir Pantai Timur	0-50
2	Binjai	Pesisir Pantai Timur	0-50
3	Tanjung Balai	Pesisir Pantai Timur	0-20
4	Deli Serdang	Pesisir Pantai Timur	0-100
5	Langkat	Pesisir Pantai Timur	0-200
6	Serdang Bedagai	Pesisir Pantai Timur	0-50
7	Batu Bara	Pesisir Pantai Timur	0-100
8	Tebing Tinggi	Dataran Rendah	50-100
9	Pematang Siantar	Dataran Rendah	100-200
10	Asahan	Dataran Rendah	50-200
11	Labuhan Batu	Dataran Rendah	50-150
12	Labuhan Batu Selatan	Dataran Rendah	50-150
13	Labuhan Batu Utara	Dataran Rendah	50-150
14	Simalungun	Dataran Rendah	100-500
15	Karo	Dataran Tinggi	1.200-1.500
16	Toba Samosir	Dataran Tinggi	900-1.500
17	Samosir	Dataran Tinggi	905-1.630
18	Humbang Hasundutan	Dataran Tinggi	900-1.800
19	Dairi	Dataran Tinggi	1.000-2.000
20	Pakpak Bharat	Dataran Tinggi	1.000-2.200
21	Tapanuli Utara	Pegunungan Bukit Barisan	500-2.500

Sumber: *Badan Pusat Statistik (2024)*

**Tabel 4.1 Topografi Wilayah Menurut Kab/Kota di Sumatera Utara**

No	Kabupaten/Kota	Zona Topografi	Ketinggian (mdpl)
22	Tapanuli Tengah	Pegunungan Bukit Barisan	200-1.800
23	Tapanuli Selatan	Pegunungan Bukit Barisan	300-2.145
24	Mandailing Natal	Pegunungan Bukit Barisan	200-1.700
25	Padang Lawas	Pegunungan Bukit Barisan	200-1.200
26	Padang Lawas Utara	Pegunungan Bukit Barisan	200-1.500
27	Padang Sidempuan	Pegunungan Bukit Barisan	200-800
28	Sibolga	Pesisir Pantai Barat	0-100
29	Gunungsitoli	Pesisir Pantai Barat	0-150
30	Nias	Pesisir Pantai Barat	0-886
31	Nias Selatan	Pesisir Pantai Barat	0-600
32	Nias Utara	Pesisir Pantai Barat	0-500
33	Nias Barat	Pesisir Pantai Barat	0-400

Sumber: *Badan Pusat Statistik (2024)*

Provinsi Sumatera Utara memiliki kondisi geografis yang beragam, terdiri atas wilayah daratan utama di Pulau Sumatera serta sejumlah kepulauan seperti Pulau Nias, Pulau Batu, dan beberapa pulau kecil lainnya di bagian barat dan timur. Wilayah kepulauan ini tersebar dan relatif terpisah dari pusat pemerintahan provinsi yang berada di Medan, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses pembangunan, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas menjadi kendala utama, karena transportasi ke wilayah kepulauan seperti Nias masih sangat bergantung pada jalur laut dan udara yang tidak selalu tersedia secara merata dan terjangkau.

Selain hambatan geografis, wilayah kepulauan umumnya mengalami keterbatasan dalam hal fasilitas ekonomi produktif, seperti industri pengolahan, akses terhadap permodalan, serta penerapan teknologi pertanian dan perikanan modern. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar masyarakat di daerah tersebut masih bergantung pada sektor informal, seperti pertanian subsisten dan perikanan tradisional, yang akhirnya memperbesar risiko terjadinya kemiskinan yang bersifat struktural dan berkelanjutan.

#### 4.1.2 Kondisi Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

Kondisi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu tantangan utama yang mempengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi di beberapa kabupaten/kota menunjukkan bahwa sumber daya yang ada belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan merupakan salah satu indikator penting untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Di Provinsi Sumatera Utara, tingkat kemiskinan menunjukkan dinamika yang berbeda-beda di setiap kabupaten/kota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), berikut disajikan persentase penduduk miskin di 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2019 hingga 2023:

**Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota di Sumatera Utara (Jiwa)**

Kab/kota	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	
Nias	221000	23120	24330	23230	21990	-0.12
Mandailing Natal	40640	41310	43240	40980	41040	0.25
Tapanuli Selatan	24220	23960	25010	23050	20090	-4.57
Tapanuli Tengah	46990	47190	49950	47070	47090	0.05
Tapanuli Utara	28570	28410	29720	27470	26390	-1.96
Toba	15780	16050	16610	16480	14940	-1.36
Labuhan Batu	41520	42170	45030	43270	42580	0.63
Asahan	70530	66320	69290	64490	61690	-3.29
Simalungun	76330	73640	76990	72470	69210	-2.42
Dairi	21860	22930	23720	22530	21420	-0.51
Karo	34080	36570	38010	35930	35650	1.13
Deli Serdang	84940	86260	92520	85280	82750	-0.65
Langkat	10308	101870	106590	100450	98160	-1.22
Nias Selatan	52510	53880	55160	54160	54290	0.84
Humbang Hasundutan	16600	17920	18710	17330	17140	0.80
Pakpak Bharat	4520	4590	4790	4520	4010	-2.95
Samosir	15790	15800	16080	14970	14860	-1.51
Serdang Bedagai	48690	49180	51160	48220	45880	-1.48
Batu Bara	50460	49780	52590	49390	49180	-0.64
Padang Lawas Utara	26060	26790	28370	26090	26170	0.11
Padang Lawas	23170	23870	25780	24450	24510	1.42

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024), diolah

**Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota di Sumatera Utara (Jiwa)**

Kab/Kota	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	
Labuhanbatu Selatan	30170	28630	30360	29380	29830	-0.28
Labuhanbatu Utara	34760	34860	37130	33910	34130	-0.46
Nias Utara	34420	34740	35840	32870	30780	-2.76
Nias Barat	22080	22330	21750	20420	18860	-3.86
Sibolga	10820	10490	10800	10050	10020	-1.90
Tanjungbalai	24540	23540	24100	22650	22450	-2.20
Pematangsiantar	21990	21230	22060	20530	18960	-3.64
Tebing Tinggi	16300	16320	17370	16340	16360	0.09
Medan	183790	183540	193030	187740	187280	0.47
Binjai	15610	15910	16460	14610	13850	-2.95
Padangsidempuan	16060	16560	17280	16030	16150	0.14
Gunungsitoli	23060	23540	24020	21850	22030	-1.14

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024), diolah

Berdasarkan data tahun 2019 hingga 2023, secara umum Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan di sebagian besar kabupaten/kota. Namun demikian, penurunan tersebut tidak terjadi secara merata, baik dari sisi persentase maupun kecepatan rata-rata pertumbuhan tahunan. Beberapa daerah seperti Asahan (-3,29%), Tapanuli Selatan (-4,57%), dan Pematangsiantar (-3,64%) mencatat penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan. Penurunan ini dapat diasosiasikan dengan adanya perbaikan dalam akses infrastruktur, program pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya kegiatan ekonomi lokal yang relatif lebih produktif. Sebaliknya, sejumlah daerah justru menunjukkan penurunan yang sangat kecil, bahkan beberapa wilayah mengalami peningkatan angka kemiskinan seperti Padang Lawas menunjukkan peningkatan kemiskinan tertinggi sebesar (1,42%), diikuti Karo (1,13%) dan Nias Selatan (0,84%).

Hal ini berarti Kawasan ini masih menghadapi tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan. Rendahnya penurunan angka kemiskinan di Kab/Kota ini disebabkan oleh ketergantungan yang tinggi terhadap sektor informal seperti pertanian dan perikanan yang memperkuat kerentanan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Kondisi ini menyebabkan angka kemiskinan yang masih tinggi,

terutama di wilayah kepulauan seperti nias dan masih berada di atas 20 persen, yang merupakan angka tertinggi di Provinsi Sumatera Utara.

#### 4.1.3 Keadaan Angkatan Kerja Perempuan Menurut Kab/Kota di Sumatera Utara

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren peningkatan selama periode 2019 hingga 2023, dari 2.891.898 orang menjadi 3.274.568 orang. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022, secara keseluruhan data mencerminkan tumbuhnya partisipasi penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi. Kenaikan ini juga dapat mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat, termasuk perempuan, untuk bekerja atau mencari pekerjaan, serta dorongan kebutuhan ekonomi rumah tangga.

**Tabel 4. 3 Angkatan kerja Perempuan Menurut Kab/Kota di Sumatera Utara (Jiwa)**

Kab/kota	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	
Nias	36 743	37 300	37 857	40 100	44 023	4.62
Mandailing Natal	96 023	96 338	98 614	100 435	84 286	-3.21
Tapanuli Selatan	60 911	69 824	62 641	65 096	73 199	4.70
Tapanuli Tengah	76 283	85 880	93 863	94 388	93 988	5.36
Tapanuli Utara	79 760	85 339	85 817	87 871	89 172	2.83
Toba	49 075	50 034	50 683	50 198	58 912	4.67
Labuhan Batu	69 804	84 190	78 287	81 198	81 778	4.04
Asahan	112 691	106 085	114 544	125 503	144 370	6.39
Simalungun	179 804	190 050	196 461	183 554	221 592	5.36
Dairi	79 451	76 296	83 231	81 590	93 443	4.14
Karo	117 737	124 897	131 546	135 672	127 590	2.03
Deli Serdang	391 565	427 689	430 810	426 004	395 573	0.25
Langkat	184 481	209 822	208 486	213 750	242 808	7.11
Nias Selatan	67 427	76 596	74 187	82 417	105 896	11.95
Humbang Hasundutan	54 637	57 025	55 868	56 918	61 524	3.01
Pakpak Bharat	12 559	13 963	14 042	14 427	15 138	4.78
Samosir	33 963	25 541	37 471	36 855	42 063	5.49
Serdang Bedagai	115 006	122 186	116 089	109 430	119 970	1.06
Batu Bara	66 358	75 652	81 425	89 757	88 288	7.40
Padang Lawas Utara	59 340	59 706	64 792	56 077	59 669	0.14
Padang Lawas	58 890	64 029	65 134	67 743	63 548	1.92

Sumber: *Badan Pusat Statistik (2024), diolah*

**Tabel 4. 4 Angkatan kerja Perempuan Menurut Kab/Kota di Sumatera Utara (Jiwa)**

Kab/kota	Tahun					Pertumbuhan Rata-rata (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	
Labuhanbatu Selatan	49 123	50 873	59 083	59 306	65 397	7.42
Labuhanbatu Utara	59 217	65 020	60 705	55 832	60 279	0.45
Nias Utara	31 625	32 183	32 892	34 281	43 578	8.35
Nias Barat	23 330	15 047	23 216	23 938	27 606	4.30
Sibolga	18 297	18 094	18 586	15 466	19 344	1.40
Tanjungbalai	27 250	29 259	32 345	35 923	36 590	7.65
Pematangsiantar	61 045	64 350	62 596	56 444	65 041	1.60
Tebing Tinggi	31 529	35 963	35 010	43 497	33 651	1.64
Medan	450572	446130	456534	428955	483 583	1.78
Binjai	52 108	52 015	51 585	44 461	53 856	0.83
Padangsidempuan	52 650	56 392	53 201	48 786	49.270	-1.65
Gunungsitoli	32 644	27 350	28 118	30 483	29.543	-2.46

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024), diolah

Berdasarkan tabel 4.3, jumlah angkatan kerja perempuan di Provinsi Sumatera Utara secara umum menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2019-2023. Namun demikian, tidak semua daerah mengalami pertumbuhan positif. Beberapa wilayah justru menunjukkan penurunan atau fluktuasi, seperti Mandailing Natal (-3,21%), Gunungsitoli (-2,46%), dan yang paling mencolok adalah Padangsidempuan (-1,65%).

#### 4.1.3.1 Perkembangan Jumlah Perempuan Bekerja Menurut Kab/Kota di Sumatera Utara

Jumlah perempuan yang bekerja merupakan indikator penting dalam melihat partisipasi kerja perempuan serta kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Di Provinsi Sumatera Utara, jumlah perempuan yang bekerja cukup tinggi antar kabupaten/kota. Tingginya partisipasi perempuan dalam dunia kerja menunjukkan berkontribusi perempuan dalam mengurangi kemiskinan.

**Tabel 4. 5 Jumlah Perempuan Bekerja Menurut Kab/Kota di Sumatera Utara (Jiwa)**

Kab/kota	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	
Nias	36485	36213	36 690	38 769	42 930	4.15
Mandailing Natal	89037	90176	89 420	93 469	77 575	-3.39
Tapanuli Selatan	59367	68206	61 688	63 101	71 264	4.67
Tapanuli Tengah	72488	81710	85906	87791	87620	4.85
Tapanuli Utara	79056	83446	84231	86735	88678	2.91
Toba	48424	48747	50356	49690	57621	4.44
Labuhan Batu	64315	77 52	72290	75562	76449	4.42
Asahan	103876	97703	105904	116 574	133 547	6.48
Simalungun	171172	182159	188351	170660	212786	5.59
Dairi	78607	75187	82 194	80819	92689	4.21
Karo	116081	123 201	129 606	130 810	124 971	1.86
Deli Serdang	363659	384 946	391 652	375 080	347 799	-1.11
Langkat	172036	189 579	194 991	198 261	222 973	6.70
Nias Selatan	66457	72 215	70 303	77 955	102 919	11.55
Humbang Hasundutan	54448	56 291	55 347	56 837	61 204	2.97
Pakpak Bharat	12538	13 750	13 954	14 427	15 083	4.73
Samosir	33514	25 332	37 324	36 642	41 895	5.74
Serdang Bedagai	108480	116 093	112 303	100 344	114 089	1.27
Batu Bara	61 210	70 493	75 739	85 247	58 101	-1.29
Padang Lawas Utara	57 814	58 208	63 193	53 867	59 598	0.76
Padang Lawas	56 057	61 795	62 884	63 509	62 726	2.85
Labuhanbatu Selatan	45 567	48 867	56 877	56 515	62 726	8.32
Labuhanbatu Utara	55 016	57 700	54 754	51 809	56 099	0.49
Nias Utara	30 550	30 646	31 818	33 414	42 453	8.57
Nias Barat	23 113	14 913	23 086	23 828	27 308	4.26
Sibolga	16 818	16 650	17 400	14 402	17 988	1.70
Tanjungbalai	25 214	27 131	30 314	34 182	35 165	8.67
Pematangsiantar	55 111	58 806	57 927	53 114	60 017	2.15
Tebing Tinggi	28 661	32 373	32 151	41 883	31 628	2.49
Medan	414 521	391 098	400 108	393 041	438 420	1.41
Binjai	49 127	47 655	47 364	41 522	48 257	-0.45
Padangsidempuan	51 008	53 512	50 486	45 975	46 477	-2.30
Gunungsitoli	31 411	25 606	26 944	28 982	28 682	-2.25

Sumber: *Badan Pusat Statistik (2024), diolah*

Berdasarkan tabel 4.4, jumlah perempuan bekerja di Sumatera Utara selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang cenderung meningkat, meskipun terdapat fluktuasi di beberapa kabupaten/kota. Beberapa wilayah mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi, seperti Nias Selatan (11,55%), Labuhanbatu Selatan (8,32%), Tanjungbalai (8,67%), dan Nias Utara (8,57%). Beberapa wilayah lainnya menunjukkan pertumbuhan yang sangat rendah, seperti Labuhanbatu Utara (0,49%) Padang Lawas Utara (0,76%) dan Medan (1,41%), ataupun daerah yang menunjukkan tren penurunan, seperti Mandailing Natal (-3,39%), Padangsidempuan (-2,30%), Gunungsitoli (-2,25%), serta Binjai (-0,36%). Medan sebagai ibu kota provinsi menunjukkan pertumbuhan rata-rata jumlah perempuan bekerja sangat rendah hanya 1,41%, hal ini menunjukkan bahwa salah satu alasan utama mengapa pertumbuhan jumlah perempuan bekerja di Kota Medan tergolong rendah, yaitu hanya sebesar 1,41% per tahun selama periode 2019–2023, adalah tingginya tingkat persaingan di pasar kerja yang menjadi karakteristik kota-kota besar. Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara merupakan pusat perdagangan, jasa, dan pendidikan, yang menarik arus urbanisasi dan migrasi tenaga kerja dari berbagai daerah. Akibatnya, jumlah pencari kerja, baik laki-laki maupun perempuan, meningkat pesat dan menyebabkan persaingan memperoleh pekerjaan menjadi sangat ketat, terutama untuk posisi formal yang bergaji layak dan memiliki jaminan sosial.

#### **4.1.3.2 Perkembangan Jumlah Pengangguran Perempuan Menurut Kab/Kota di Sumatera Utara**

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi daerah yang berdampak terhadap tingkat kemiskinan. Tingginya angka pengangguran tidak hanya mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan tenaga kerja, tetapi juga menjadi indikator lemahnya daya serap pasar kerja terhadap angkatan kerja yang tersedia. Data BPS (2025) Sumatera Utara mencatat bahwa pengangguran terbuka perempuan di provinsi ini mengalami fluktuasi, dengan puncak kenaikan pada tahun 2020.

Data jumlah pengangguran perempuan di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang bervariasi antarwilayah, dengan sebagian daerah mengalami peningkatan signifikan, sementara lainnya

justru mencatat penurunan. Secara umum, sejumlah kabupaten/kota mengalami lonjakan pengangguran perempuan, mengindikasikan bahwa pertumbuhan angkatan kerja perempuan tidak sepenuhnya diimbangi oleh ketersediaan lapangan kerja yang memadai.

**Tabel 4. 6 Jumlah Pengangguran Perempuan Menurut Kab/Kota di Sumatera Utara (Jiwa)**

Kab/kota	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (Persen)
	2019	2020	2021	2022	2023	
Nias	258	1087	1167	1331	1093	43.47
Mandailing Natal	6986	6162	9194	6966	6711	-1.00
Tapanuli Selatan	1544	1618	953	1995	1935	5.81
Tapanuli Tengah	3795	4170	7957	6597	6368	13.81
Tapanuli Utara	704	1893	1586	1136	494	-8.48
Toba	651	1287	327	508	1291	18.67
Labuhan Batu	5489	6638	5997	5636	5329	-0.74
Asahan	8815	8382	8640	8929	10823	5.26
Simalungun	8632	7891	8110	12894	8806	0.50
Dairi	844	1109	1037	771	754	-2.78
Karo	1656	1696	1940	4862	2619	12.14
Deli Serdang	27906	42743	39149	50924	47774	14.39
Langkat	12445	20243	13495	15489	19835	12.36
Nias Selatan	970	4381	3884	4462	2977	32.36
Humbang Hasundutan	189	734	521	81	320	14.07
Pakpak Bharat	21	213	88		55	27.21
Samosir	449	209	147	213	168	-21.79
Serdang Bedagai	6522	6093	3786	9086	5881	-2.55
Batu Bara	5148	5159	5686	4510	5991	3.86
Padang Lawas Utara	1526	1498	1599	2210	1568	0.68
Padang Lawas	2833	2234	2250	4215	3950	8.66
Labuhanbatu Selatan	3556	2006	2206	2791	2671	-6.90
Labuhanbatu Utara	4201	7320	5951	4023	4180	-0.13
Nias Utara	1075	1537	1074	867	1125	1.14
Nias Barat	217	134	130	110	298	8.25
Sibolga	1479	1444	1186	1064	1356	-2.15
Tanjungbalai	2036	2128	2031	1741	1425	-8.53
Pematangsiantar	5934	5544	4669	3330	5024	-4.08
Tebing Tinggi	2868	3590	2859	1614	2023	-8.36
Medan	36051	55032	56426	35914	45163	5.80
Binjai	2981	4360	4221	2939	5599	17.07
Padangsidempuan	1642	2880	2715	2811	2793	14.20
Gunungsitoli	1233	1744	1174	1501	861	-8.59

Sumber: *Badan Pusat Statistik (2024), diolah*

Beberapa daerah di Sumatera Utara mencatat lonjakan tinggi dalam pertumbuhan pengangguran perempuan, seperti Nias (43,47%), Nias Selatan (32,36%), dan Pakpak Bharat (27,21%). Hal ini mencerminkan ketimpangan antara meningkatnya jumlah perempuan yang masuk pasar kerja dan terbatasnya lapangan kerja yang tersedia, terutama di wilayah kepulauan seperti nias daerah kepulauan yang memiliki lapangan usaha utama yang masih bergantung pada sektor informal, seperti itu di sektor pertanian dan perikanan. Tingginya pengangguran perempuan di wilayah seperti Nias tidak hanya dipengaruhi oleh terbatasnya lapangan kerja, tetapi juga oleh faktor geografis yang kompleks. Sebagai daerah kepulauan yang terpisah dari daratan utama Sumatera Utara, Nias menghadapi kendala aksesibilitas yang signifikan terhadap pusat pemerintahan dan ekonomi, seperti Kota Medan. Kondisi ini menyebabkan rendahnya akses perempuan terhadap pelatihan keterampilan, pendidikan vokasional, informasi pasar kerja, serta infrastruktur penunjang seperti transportasi, teknologi, dan fasilitas publik. Akibatnya, banyak perempuan di wilayah ini berada dalam kondisi pengangguran terbuka atau terselubung, yang sulit diatasi tanpa pemerataan pembangunan dan kebijakan ketenagakerjaan yang responsif terhadap tantangan geografis dan kesetaraan gender. Sementara itu, kota besar seperti Medan (5,80%), Binjai (17,07%), dan Deli Serdang (14,39%) juga mengalami kenaikan pengangguran perempuan, menunjukkan bahwa persaingan kerja yang ketat di wilayah urban belum diimbangi dengan akses kerja yang setara bagi perempuan.

#### **4.1.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kab/Kota di Sumatera Utara**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) perempuan di Sumatera Utara menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2019 hingga 2023. Secara umum, Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren yang stabil dan cenderung meningkat secara perlahan pada sebagian besar kabupaten/kota selama periode 2019 hingga 2023. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan relatif dalam akses perempuan terhadap pembangunan, terutama dalam tiga dimensi utama IPG: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

**Tabel 4. 7 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kab/Kota Sumatera Utara (Persen)**

Kab/kota	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	
Nias	91.23	90.81	91.25	91.28	91.05	-0.05
Mandailing Natal	93.62	93.24	93.47	93.42	93.68	0.02
Tapanuli Selatan	91.33	90.86	90.74	90.99	90.63	-0.19
Tapanuli Tengah	94.78	94.85	94.93	94.95	95.23	0.12
Tapanuli Utara	98.04	97.98	97.93	98.16	97.75	-0.07
Toba	98.14	97.96	98.06	98.51	98.32	0.05
Labuhan Batu	91.05	90.86	90.88	90.81	90.74	-0.09
Asahan	91.22	91.51	91.66	91.93	91.91	0.19
Simalungun	93.03	93.02	93.05	93.16	93.09	0.02
Dairi	97.77	98.02	98.05	98.15	98.44	0.17
Karo	96.31	96.19	95.9	96.38	96.36	0.01
Deli Serdang	91.31	91.29	91.18	91.61	91.92	0.17
Langkat	89.52	89.24	89.02	89.03	88.77	-0.21
Nias Selatan	87.59	87.58	88.28	89.19	89.68	0.59
Humbang Hasundutan	97.1	97.38	97.32	97.65	97.45	0.09
Pakpak Bharat	99.05	99.02	98.89	99.25	98.99	-0.02
Samosir	96.54	96.51	96.59	96.76	96.74	0.05
Serdang Bedagai	88.79	88.74	89	89.19	88.87	0.02
Batu Bara	82.93	83.08	83.22	83.51	83.76	0.25
Padang Lawas Utara	87.63	87.92	88.06	88.1	88.26	0.18
Padang Lawas	85.64	85.75	85.94	86.24	86.56	0.27
Labuhanbatu Selatan	87.43	87.43	87.61	87.98	88.34	0.26
Labuhanbatu Utara	90.03	89.8	89.96	90.13	90.43	0.11
Nias Utara	79.02	79.37	79.63	80.12	80.51	0.47
Nias Barat	86.26	86.67	86.79	87.02	87.33	0.31
Sibolga	97.53	97.63	97.89	97.9	98.01	0.12
Tanjungbalai	89.51	89.69	90.02	90.28	90.53	0.28
Pematangsiantar	95.46	95.65	95.82	95.96	95.94	0.13
Tebing Tinggi	93.55	93.53	93.32	93.62	93.64	0.02
Medan	94.02	94	93.76	93.85	94.13	0.03
Binjai	90.6	90.57	90.63	90.64	90.99	0.11
Padangsidempuan	97.59	97.67	97.87	97.92	97.53	-0.02
Gunungsitoli	89.25	89.31	89.4	89.69	89.92	0.19

Sumber: *Badan Pusat Statistik (2024), diolah*

Berdasarkan Tabel 4.6, beberapa daerah mengalami penurunan atau stagnasi, seperti Tapanuli Selatan (-0,19%), Langkat (-0,21%), dan Tapanuli Utara (-0,07%), yang mengindikasikan bahwa kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan belum mengalami kemajuan berarti. Faktor penyebabnya dapat berasal dari ketimpangan kesempatan kerja, keterbatasan peran perempuan di sektor formal, hingga peran domestik yang masih dominan. Sementara itu, kota-kota besar seperti Medan dan Binjai menunjukkan IPG yang cukup tinggi secara absolut (di atas 90 poin), namun dengan pertumbuhan yang sangat lambat, yakni hanya 0,02%–0,59% per tahun. Ini mencerminkan bahwa meskipun kesenjangan gender sudah relatif kecil di kota, tantangan peningkatan kualitas dan partisipasi perempuan di sektor strategis masih perlu diperhatikan.

Dengan demikian, meskipun IPG di Sumatera Utara secara umum menunjukkan arah positif, tingkat pertumbuhannya masih rendah dan tidak merata antar wilayah. Upaya pembangunan ke depan perlu lebih menekankan pada peningkatan kualitas akses perempuan terhadap pekerjaan layak, pendidikan tinggi, dan peran dalam pengambilan keputusan, terutama di daerah tertinggal dan kepulauan.

## 4.2 Hasil Analisis Data

### 4.2.1 Uji Penentu Model Terbaik

#### 4.2.1.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model yang tepat dalam analisis data panel adalah Common Effect Model (CEM) atau Fixed Effect Model (FEM). Jika  $p\text{-value} > 0,05$ , maka CEM lebih sesuai. Sebaliknya, jika  $p\text{-value} < 0,05$ , maka FEM dipilih karena ada perbedaan signifikan antarindividu. Berikut hasil uji Chow yang diperoleh:

**Tabel 4. 8 Hasil Uji Chow**

Effect Test	Prob.	Alpha
Cross section F	0.0000	0,05
Cross section Chi-Square	0.0000	0,05

*Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2025*

Berdasarkan tabel pengujian Chow diatas, diperoleh nilai probabilitas *chi square* sebesar 0.0000, dimana lebih kecil dibanding taraf signifikansi 0.05, Sehingga model terpilihnya ialah FEM.

#### 4.2.1.2 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model yang paling tepat antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) dalam analisis data panel. Apabila nilai probabilitas  $< 0,05$ , maka FEM dinilai lebih konsisten dan layak digunakan. Sebaliknya, jika nilai probabilitas  $> 0,05$ , maka REM lebih sesuai diterapkan. Adapun hasil pengujian Hausman yang diperoleh adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 9 Hasil Uji Hausman**

Effect Test	Prob>Chi2	Alpha
Cross Section Random	0.000	0.05

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2025

Hasil dari uji Hausman menunjukkan bahwa diperoleh nilai Prob>chi2 sebesar 0.000 atau lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05. Dengan demikian, disimpulkan bahwa model yang tepat digunakan adalah FEM.

#### 4.2.2 Uji Asumsi Klasik

##### 4.2.2.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan mengidentifikasi hubungan kuat antara variabel independen dalam model regresi. Indikator yang digunakan adalah nilai Variance Inflation Factor (VIF), di mana  $VIF < 10$  menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas, sedangkan  $VIF > 10$  mengindikasikan sebaliknya. Nilai tolerance  $> 0,10$  juga menandakan tidak adanya multikolinearitas. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	VIF	1/VIF	Kesimpulan
LnJPB	2.58	0.386856	Tidak terjadi Multikolinearitas
LnJPT	2.69	0.372238	Tidak terjadi Multikolinearitas
LnIPG	1.11	0.903265	Tidak terjadi Multikolinearitas
MEAN VIF	2.13		

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa VIF keempat variabel independen masing-masing kecil dari 10 dan diperoleh nilai *tolerance* ( $1/VIF$ ) masing-masing variabel yang besar dari 0.10 sehingga dapat ditarik Kesimpulan bahwa model regresi tidak ditemukan gejala multikolinearitas.

#### 4.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk mengidentifikasi adanya ketidakhomogenan varians dari residual dalam model regresi, khususnya apakah varians residual bervariasi antar pengamatan yang disebabkan oleh perbedaan nilai variabel independen. Suatu model dinyatakan bebas dari permasalahan heteroskedastisitas apabila nilai probabilitas yang dihasilkan melebihi tingkat signifikansi 0,05. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas berada di bawah ambang tersebut, maka terdapat indikasi kuat bahwa model mengalami gejala heteroskedastisitas. Adapun hasil pengujian heteroskedastisitas disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4. 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Prob>chi2	Alpha	Interpretasi
0.1022	0.05	Tidak Terdapat Heteroskedastisitas

*Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2025*

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang ditampilkan pada tabel di atas, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.1022, yang  $> 0,05$ . Temuan ini mengindikasikan tidak adanya gejala heteroskedastisitas dalam model.

### 4.3.3 Uji Statistik

#### 4.3.3.1 Uji f Statistik

Uji F berfungsi untuk mengevaluasi sejauh mana variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Penilaian dilakukan dengan membandingkan nilai f hitung terhadap batas signifikansi yang telah ditetapkan. Apabila nilai p-value melebihi tingkat signifikansi ( $\alpha$ ), maka pengaruh kolektif variabel-variabel independen tersebut dianggap tidak cukup kuat atau tidak signifikan secara statistik, yang menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh simultan pada tingkat signifikansi 5%, hasil uji f yang diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 4. 12 Hasil Uji f-Statistik**

Prob F-Statistik	Alpha	Kesimpulan
0.0014	0.05	Signifikan

*Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2025*

Hasil estimasi menunjukkan nilai probabilitas f-statistik sebesar  $0.0014 < 0.05$ , dengan demikian disimpulkan bahwa secara simultan semua variabel independen, yaitu jumlah perempuan bekerja, jumlah pengangguran perempuan dan IPG, berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya yakni kemiskinan di Provinsi Sumatera utara.

#### 4.3.3.2 Uji t Statistik

Uji t digunakan untuk mengukur sejauh mana setiap variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika p-value lebih kecil dari nilai signifikansi, maka variabel tersebut dinyatakan berpengaruh signifikan secara statistik. Berikut disajikan hasil uji t yang diperoleh:

**Tabel 4. 13 Hasil Uji t-Statistik**

Variabel Independen	Koefisien Regresi	R.Standard Error	t-Statistik	Prob.	Kesimpulan
LnJPB	-0.0681412	0.0296045	-2.30	0.023	Signifikan
LnJPT	0.0127428	0.0096695	1.32	0.190	Tidak Signifikan
LnIPG	-2.674615	1.111308	-2.41	0.018	Signifikan

*Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2025*

Keterangan:

- 1) Variabel Jumlah Perempuan Bekerja (JPB) menghasilkan probabilitas sebesar 0.023, dimana lebih besar dari taraf signifikansi 0.05, maka disimpulkan Jumlah Perempuan Bekerja (JPB) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera utara.
- 2) Variabel Jumlah Perempuan Menganggur (JPT) menghasilkan probabilitas sebesar 0.190, lebih besar dari taraf signifikansi 0.05, sehingga disimpulkan jumlah pengangguran perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera utara.

- 3) Variabel Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan nilai probabilitas sebesar  $0.018 < 0,05$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa IPG memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

#### 4.3.3.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar seluruh variabel independen dalam model mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, maka semakin besar pula proporsi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independent dan sebaliknya.

**Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinan**

R-Square	Interpretasi
0.1141	Variabel dependen mampu menjelaskan variabel dependen sebanyak 11,42 persen

*Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2025*

Berdasarkan tabel di atas, nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.1141 menunjukkan bahwa secara statistik, variabel-variabel independen dalam model mampu menjelaskan 11,41% variasi yang terjadi pada variabel dependen. Sementara itu, sisanya sebesar 88,59% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

#### 4.3.3.4 Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, Fixed Effect Model (FEM) terpilih sebagai model yang paling sesuai. Namun, hasil uji asumsi klasik menunjukkan adanya indikasi heteroskedastisitas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan koreksi dengan menerapkan FEM menggunakan metode Robust Standard Error. Adapun output regresi yang dihasilkan disajikan sebagai berikut:



### 4.3 Interpretasi Hasil Analisis Data

#### 4.3.1 Pengaruh Jumlah Perempuan Bekerja Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan output regresi, diperoleh nilai koefisien sebesar  $-0.0681412$  dengan *p-value* sebesar  $0,023$  yang lebih kecil dari  $0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan bekerja berpengaruh signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan, di mana peningkatan jumlah perempuan yang bekerja cenderung menurunkan kemiskinan. Temuan ini sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan serta konsisten dengan teori yang mendasari penelitian. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Haq dan Amin (2014) yang menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan Girma Mulugeta (2021), hasilnya menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pasar tenaga kerja secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan. Perempuan yang bekerja mampu memberikan kontribusi tambahan terhadap pendapatan rumah tangga sehingga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Dalam konteks rumah tangga miskin, pendapatan perempuan sering kali menjadi pelengkap bahkan penentu pemenuhan kebutuhan dasar.

Berdasarkan data BPS (2024), di Provinsi Sumatera Utara, jumlah perempuan bekerja tergolong tinggi yaitu rata-rata 80 sampai 90 persen dari total angkatan kerja perempuan, terutama di wilayah yang masih bergantung pada sektor informal seperti nias, hal ini menunjukkan bahwa perempuan berkontribusi dan memiliki peran aktif dalam mendukung perekonomian keluarga. Dorongan kebutuhan ekonomi membuat perempuan terlibat langsung dalam aktivitas produktif, sehingga wajar apabila jumlah perempuan bekerja memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan di wilayah ini. Namun demikian, hasil penelitian ini bertentangan dengan temuan Nafisah dan Anas (2021) yang menyatakan bahwa jumlah perempuan bekerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh perbedaan wilayah, karakteristik populasi, serta pendekatan analisis yang digunakan dalam masing-masing penelitian.

#### 4.3.2 Pengaruh Jumlah Pengangguran Perempuan Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis regresi, ditemukan bahwa jumlah perempuan menganggur memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Temuan ini selaras dengan landasan teori maupun hipotesis awal yang dikemukakan dalam penelitian, serta bertentangan dengan studi Abda dan Cahyono (2022) yang menunjukkan bahwa jumlah perempuan menganggur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Meskipun demikian, hasil ini sejalan dengan temuan Kurniasih et al. (2022) di Provinsi Riau, yang juga menunjukkan bahwa pengangguran perempuan berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Ketidaksignifikan pengaruh pengangguran perempuan terhadap kemiskinan dapat dijelaskan melalui kondisi riil di Provinsi Sumatera Utara, di mana tingkat pengangguran perempuan tergolong rendah. Data dari BPS (2024), menunjukkan bahwa selama periode 2019 hingga 2023, rata-rata pengangguran perempuan di Sumatera Utara berada dalam kisaran 5 sampai 7 persen. Ini mengindikasikan bahwa hanya sebagian kecil dari perempuan yang masuk dalam angkatan kerja yang tidak terserap ke dalam pasar kerja. Dengan kata lain, sebagian besar perempuan yang mencari pekerjaan mampu memperoleh pekerjaan, meskipun tidak semua pekerjaan tersebut berada dalam sektor formal atau berpenghasilan tinggi.

Jumlah pengangguran perempuan yang relatif kecil menyebabkan variabel jumlah Perempuan menganggur tidak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap variasi tingkat kemiskinan di daerah ini. Artinya, naik turunnya tingkat kemiskinan di Sumatera Utara lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar pengangguran perempuan, seperti kualitas pekerjaan yang tersedia, produktivitas tenaga kerja perempuan, serta rendahnya tingkat pendapatan dan akses terhadap pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, meskipun pengangguran merupakan masalah yang relevan, namun dalam konteks perempuan di Sumatera Utara, jumlahnya yang terbatas membuat dampaknya terhadap kemiskinan menjadi tidak signifikan secara statistik.

### 4.3.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Gender (IPG) Terhadap Kemiskinan

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien untuk variabel Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar -2.674615 dengan tingkat signifikansi (p-value)  $0,018 < 0,05$ . Hal ini mengindikasikan bahwa IPG berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kemiskinan. Temuan ini mendukung hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dan sejalan dengan kerangka teori yang menjadi dasar penelitian. Meskipun demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Saputri et al. (2023), yang menyatakan bahwa IPG tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Temuan ini juga konsisten dengan hasil Prastyorini et al. (2025), yang menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Peningkatan IPG mencerminkan adanya peningkatan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses kesempatan kerja, pendidikan tinggi, dan posisi pengambilan keputusan. Kondisi ini memungkinkan perempuan untuk turut berkontribusi dalam pendapatan rumah tangga, sehingga mampu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dan menurunkan risiko kemiskinan.

Berdasarkan data tahun 2019 hingga 2023, rata-rata Indeks Pembangunan Gender (IPG) di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara berada pada kisaran 90 hingga 98. Nilai ini menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di wilayah ini relatif kecil, yang mencerminkan adanya kemajuan dalam pencapaian kesetaraan gender. Kabupaten/kota seperti Dairi, Toba, dan Pakpak Bharat mencatat IPG tertinggi dengan rata-rata di atas 98, menunjukkan kondisi pembangunan yang sangat setara antara laki-laki dan perempuan. Disisi lain, beberapa wilayah seperti Nias Utara, Nias Barat, dan Batu Bara masih mencatat IPG di bawah 90, mengindikasikan perlunya peningkatan upaya pemberdayaan perempuan. Secara umum, rata-rata IPG yang cukup tinggi di Sumatera Utara turut berkontribusi signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, karena semakin kecil kesenjangan gender, semakin besar pula kesempatan perempuan untuk terlibat dalam pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi produktif yang mendukung kesejahteraan rumah tangga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi maka diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara simultan seluruh variabel independen yang dianalisis, meliputi jumlah perempuan yang bekerja, jumlah pengangguran perempuan, dan IPG terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2019 hingga 2023.
2. Secara parsial, variabel jumlah perempuan bekerja memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2019 hingga 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja berkontribusi nyata dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut.
3. Secara parsial, variabel jumlah perempuan menganggur menunjukkan hubungan positif namun tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara sepanjang periode 2019 hingga 2023. Dengan kata lain, meskipun arah pengaruhnya menurun, besarnya pengaruh tersebut tidak cukup kuat untuk dianggap bermakna dalam konteks penelitian ini.
4. Secara parsial, variabel IPG menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2019 hingga 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan dalam kualitas pembangunan manusia berkontribusi secara nyata dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah tersebut pada rentang waktu tersebut.

#### **5.2 Saran**

Mengacu pada hasil temuan, berikut beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Pemerintah di setiap kabupaten atau kota diharapkan dapat memperkuat fokus pada peningkatan kualitas dan produktivitas pekerjaan perempuan, agar perempuan lebih banyak bekerja pada sektor formal yang memiliki pendapatan yang lebih besar sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari kemiskinan.

2. Meskipun pengangguran terbuka perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, pemerintah tetap perlu meningkatkan kualitas dan akses terhadap lapangan kerja yang layak bagi perempuan. Pemerintah daerah bersama mitra swasta atau organisasi perempuan dapat mengembangkan program digitalisasi usaha rumahan, seperti pelatihan pemasaran online, penggunaan e-commerce, dan keuangan digital. Dengan cara ini, perempuan yang tidak bekerja secara formal tetap bisa menghasilkan pendapatan melalui platform digital dari rumah. Agar perempuan tetap bisa menjalankan aktivitas ekonomi dari rumah tanpa mengganggu tanggung jawab keluarga.
3. Pemerintah daerah diharapkan untuk terus mendorong peningkatan IPG, khususnya melalui kebijakan yang mendukung partisipasi aktif perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk pendidikan, kesehatan, serta ekonomi dan politik. meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dapat dilakukan melalui program pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik, guna memperkuat peran dan posisi perempuan dalam masyarakat serta dapat berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

### 5.3 Keterbatasan Studi

Penelitian ini telah dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah, namun masih terdapat sejumlah keterbatasan diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengandalkan tiga indikator utama untuk menganalisis pengaruh perempuan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, yaitu jumlah perempuan yang bekerja, jumlah Perempuan menganggur, serta indeks pembangunan gender. Padahal, merujuk pada berbagai studi sebelumnya, terdapat sejumlah variabel independen lain yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap kemiskinan, seperti tingkat upah perempuan, kontribusi pendapatan perempuan terhadap rumah tangga, dan variabel relevan lainnya. Dengan demikian, para peneliti yang hendak mengkaji topik serupa disarankan untuk memasukkan variabel-variabel tambahan agar dapat menghasilkan temuan yang lebih mendalam,

menyeluruh, dan memiliki kontribusi yang lebih signifikan dalam pengembangan ilmu maupun perumusan kebijakan.

2. Penelitian ini terbatas pada analisis tingkat kemiskinan secara agregat di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara, sehingga belum mampu menggambarkan kondisi spesifik di masing-masing wilayah. Untuk itu, penelitian selanjutnya disarankan melakukan analisis pada tingkat daerah yang lebih kecil agar hasilnya lebih terfokus dan relevan bagi perumusan kebijakan lokal.
3. Penelitian ini mencakup rentang waktu selama lima tahun, yakni dari 2019 hingga 2023. Keterbatasan dalam ketersediaan dan publikasi data terkini menjadi hambatan bagi penulis untuk melibatkan data di luar periode tersebut. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengeksplorasi isu serupa, disarankan untuk memperluas cakupan waktu penelitian guna memperoleh hasil analisis yang lebih kaya dan representatif

